

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Defenisi Peran

Menurut **Soerjono Soekanto (2002:243)** peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social.

Adapun syarat-syarat peran dalam **Soerjono Soekanto (2002:243)** mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut **Veithzal Rivai (2004:148)** peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. **Miftha Thoha (2005:10)** peranaan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut **J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160)** peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan social yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan social dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

2.2 Defenisi Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut **Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18)** dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Tjokroamidjojo (1988:19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjabatan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action lader” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action lader.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
4. Pengaruh langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
5. Pengaruh tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh **Sondang P. Siagian** dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (**Nyoman Sumaryadi, 2010 : 21**).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (**Sitanggang, 1996 :134**). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan **Talidzu Ndraha (2011)** peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.\
6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1 Peran Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru menerapkan peran dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya sumber daya Ketenagakerjaan yang menyeluruh serta perencanaan tenaga kerja.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan produktifitas tenaga kerja.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pemberdayaan lembaga latihan swasta.
4. Terwujudnya sistem informasi pasar kerja dan mekanisme antar kerja.
5. Terwujudnya peningkatan pengawasan dan penempatan tenaga kerja disektor formal dan informal.
6. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha guna peningkatan kesejahteraan pekerja.
7. Terwujudnya sarana hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.
8. Terwujudnya perlindungan Ketenagakerjaan melalui system pengawasan Ketenagakerjaan.
9. Terwujudnya keikutsertaan pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan administrasi.
10. Terwujudnya kelancaran kerja dengan tersedianya sarana dan prasarana

Adapun peran dinas tenaga kerja kota pekanbaru ada sebanyak 11 jenis

Pelayanan, yaitu :

- 1) Pelayanan AK-1 (Kartu Pencari Kerja)
- 2) Pelayanan BKK (Bursa Kerja Khusus)
- 3) Pelayanan rekom Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
- 4) Pelayanan izin pendirian UPT. CTKI
- 5) Pelayanan Rekom Izin memperkejakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
- 6) Pelayanan izin pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKI)
- 7) Pelayanan izin pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Asing (LPTKI)
- 8) Pelayanan Pendaftaran pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
- 9) Pelayanan pendaftaran Transmigrasi
- 10) Pelayanan Bursa Kerja Online
- 11) Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

1.3 Defenisi Tenaga Kerja

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Pokok Ketenagakerjaan Pasal 1 disebutkan Tenaga kerja adalah setiap orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut **Mulyadi (2003:57)** Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Menurut **Simanjuntak (2001:5)** Tenaga kerja adalah sumber daya manusia memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

1.3.1 Jenis-jenis Tenaga Kerja

Badan Pusat Statistik membagi tenaga kerja (*employed*), yaitu :

- a. Tenaga Kerja Penuh (*full employed*) , adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;
- b. Tenaga Kerja Tidak Penuh atau Setengah Pengangguran (*Under Employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja <35 jam seminggu; dan
- c. Tenaga Kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), yaitu tenaga kerja dengan jam kerja 0>1 jam perminggu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.4 Defenisi Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan adalah suatu badan atau organisasi yang menangani sekaligus menampung masyarakat yang mempunyai keahlian untuk dijadikan tenaga kerja diluar maupun di dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005, penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja, pengguna tenaga kerja supaya pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya serta pemberi kerja memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Penempatan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas penempatan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penempatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab dari pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 dan pada pasal 28 ayat 2, dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dan fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat atau pelayanan publik.

Penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah melaksanakan kebijakan public dibidang ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi angka pengangguran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1994 tentang penempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kerja didalam dan diluar negeri. Secara nasional, angka pengangguran terus bertambah bahkan meningkat dari tahun ke tahun.

Hubungan Dinas Tenaga Kerja dengan perusahaan dalam penempatan tenaga kerja sangat penting, proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang di butuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

2.5 Pandangan Islam tentang Konsep Penelitian

Dalam islam selain faktor materi ada pula nilai-nilai moral yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam mengambil keputusan. Upah atau gaji pasti dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya meskipun allah telah menjamin memberikan rizki kepada semua makhluk yang telah di ciptakan.

﴿مُبِينٌ كَتَبَ فِي كُلِّ مِصْرٍ وَمُسْتَوْدَعَهَا مُسْتَقَرَّرَهَا وَيَعْلَمُ رِزْقَهَا اللَّهُ عَلَى إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا ۖ﴾

“Dan tidak ada satu hewan melatapun di bumi melainkan allah-lah yang memberi rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dakam kitab yang nyata (laukhil mahfuzd)” QS.

Huud ayat 6

Walaupun dalam ayat tersebut allah telah menjaminnya, tetepi hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat yang paling penting adalah usaha kita dalam mencari rizki yang di janjikan oleh allah, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

allah telah membuat sistem yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang mendapat rizki dan siapa yang berpangku tangan akan kehilangan rizki.

Bermalas-malasan atau menganggur selain mendatangkan efek negative bagi pelaku secara langsung, juga akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian. Karena pengangguran akan mengakibatkan ketidak optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat sebagian potensi faktor produksi yang tidak dimanfaatkan. Kelompok pengangguran akan menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang produktif yang menjadikan angka ketergantungan meningkat yang akibatnya merosotnya pendapatan perkapita.

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, berdagang dll. Islam tidak semata-mata memerintahkan untuk bekerja, tetapi bekerja harus dengan baik (ihsan) penuh ketekunan dan profesional. Ihsan dalam bekerja merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap muslim.

“Sesungguhnya allah mencintai jika seorang melakukan pekerjaan yang di lakukan secara itqam (profesional)” HR. Baihaqi

Menurut **Qaradhawi (2005:6-8)** pengangguran dapat di bagi menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah (karena terpaksa) dan pengangguran khiyariyah (karena pilihan). Kedua jenis pengangguran ini mempunyai posisi dan hukumnya masing-masing dalam syari'ah.

1. Pengangguran Jabariyah (karena terpaksa)

Pengangguran dimana seorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena seseorang yang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa digali dan di pelajari sejak kecil. Atau dia mempunyai keterampilan tetapi itu semua tidak berguna karena berubahnya lingkungan dan zaman. Atau dia sudah mempunyai keterampilan akan tetapi dia tidak dapat memanfaatkan karena kurangnya alat atau modal yang di butuhkan. Contoh ada seseorang yang ahli dalam bertani, tetapi dia tidak mempunyai alat untuk membajak ataupun sepetak lahan untuk dia garap.

2. Pengangguran Khiyariyah (karena pilihan).

Adalah seseorang yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak mengusahakan suatu pekerjaan sehingga menjadi “sampah masyarakat”. Islam sangat memerangi orang-orang seperti ini, walaupun dari mereka ada yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan pekerjaan dunia untuk menkonsentrasikan diri untuk beribadah kepada Allah.

Adanya pengangguran di kelompokkan menjadi dua ini berkaitan erat dengan solusi yang di tawarkan islam dalam mengatasi pengangguran. Untuk pengangguran jabariyah perlu bantuan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki dengan bantuan yang mereka butuhkan. Bantuan itu, bukan sekedar uang atau bahan makanan yang cepat habis, melainkan alat-alat yang mereka butuhkan untuk dapat bekerja. Sebaliknya dengan pengangguran khiyariyah, mereka tidak seharusnya mendapat bantuan materi melainkan motivasi agar mereka bisa memfungsikan potensi yang mereka miliki.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindari adanya duplikasi pada tema penelitian (Idrus, 2009:52)

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Tahun Peneliti | Judul | Hasil |
|----|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Anisa Wardah | 2015 | Analisis Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Angka Pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru | Hasil penelitian ini yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan usaha untuk mengurangi angka pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru melalui : a. Job Covansing b. Job Expo c. Bursa Kerja Online |
| 2 | Irma Afriani | 2014 | Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Studi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja local di kecamatan Mandau belum berjalan dengan optimal, karena banyak perusahaan yang ada di kecamatan Mandai belum menjadi jaminan bagi para pencari kerja local untuk mendapatkan pekerjaan di daerah mereka sendiri. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan sudah berjalan baik tetapi dalam pelaksanaan program pelarihan masih perlu ditingkatkan lagi. |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Adapun konsep penelitian dari peran dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran di kota pekanbaru .

1. Peran Pemerintah adalah upaya yang secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan tingkat kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan pernah dicapai secara absolute.
2. Tenaga Kerja adalah Sumber daya manusia sumber daya tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan sehingga berhasil guna bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Penempatan Tenaga kerja adalah suatu badan atau organisasi yang menangani sekaligus menampung masyarakat yang mempunyai keahlian untuk dijadikan tenaga kerja baik diluar maupun dalam negeri

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang berisi tentang indikator untuk mengukur nilai variable. Di dalam penelitian ini konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Tenaga Kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

| Konsep | Indikator | Sub indicator |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Khususnya di Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | a. Penempatan Tenaga Kerja | a. Fasilitas Penempatan bagi pencari kerja. b. Rekrutmen dan seleksi Tenaga Kerja c. Mengawasi pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja. |
| | b. Informasi | a. Lowongan pekerjaan. b. Penyelenggaraan pameran bursa kerja. c. Pendaftaran pencari kerja. |
| | c. Pengembangan dan Perluasan | a. Penciptaan lapangan kerja baru. b. Bimbingan pelatihan tenaga kerja. c. Bimbingan kepada masyarakat terapan tentang teknologi tepat guna (TTG) dan Teknologi Padat Karya (TPK). d. Perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sector informal. |

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema sederhana yang dibuat kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah (Cholid Nurbuko 2010:140).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

